

Reformasi Birokrasi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Batang (Kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, Periode 2012 – 2017)

Mashun Mukromin Ahmad

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

mashun34@gmail.com

Abstrak

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek aparat sumber daya manusia dan prosedur kerja. Semangat reformasi pada dasarnya sudah tertuang dalam visi Kabupaten Batang “Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Profesional”. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional guna memberantas korupsi di wilayah Pemerintahan Kabupaten Batang

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Bupati, Sekda, Kepala BKD, Asisten 3, Bagian Organisasi, Disdukcapil, BPMPT, serta lima orang masyarakat Kabupaten Batang pengguna pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka memberantas korupsi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Selama masa kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo dari tahun 2012 – 2017, tidak ada data yang menunjukkan terjadinya kasus korupsi di Kabupaten Batang. Selama periode tersebut, Kabupaten Batang mengalami banyak perubahan, mulai dari prosedur kerja, struktur, tingkah laku, dan kebiasaan lama di birokrasi sudah jauh lebih baik. Reformasi birokrasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Batang yaitu sistem pemerintahan yang sudah dibentuk oleh Bupati Yoyok Riyo Sudibyo sudah baik, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lagi serta dijaga oleh berbagai pihak, pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kemudian diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya kualitas birokrasi agar senantiasa mampu menyokong terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Reformasi Birokrasi, Korupsi*

Pendahuluan

Semangat reformasi setelah masa orde baru merupakan dasar dari pelaksanaan reformasi birokrasi sampai saat ini. Tekanan dari masyarakat terutama para pelaku bisnis terhadap pemerintah, memaksanya mengeluarkan berbagai peraturan sejak pertengahan tahun 1980-an yang populer dengan sebutan deregulasi dan debirokratisasi. Sejak saat itu berbagai perubahan terus berlangsung hingga akhirnya membawa perubahan politik yang sangat besar yang dikenal sebagai reformasi.

Birokrasi dan korupsi merupakan dua hal yang erat kaitannya terutama dalam pelaksanaan tugas para birokrat. Seperti paparan yang sebelumnya, dalam menjalankan tugasnya, birokrasi yang ada saat ini cenderung kurang efektif dan efisien. Birokrasi di Indonesia pada umumnya “gendut” terlalu banyak pegawai yang menyebabkan lambannya dalam menjalankan tugas. Ada istilah lama untuk menyebut prinsip birokrasi “Kalau bisa lama, kenapa dipercepat. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Kalau bisa mahal, kenapa dipermurah”.

Terkait dengan birokrasi pemerintah daerah, Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang patut untuk dikaji, di lihat dari visi Kabupaten Batang yakni “terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang”. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi yaitu ***terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional***. Semangat reformasi pada dasarnya sudah tertuang dalam visi Kabupaten Batang, dengan reformasi birokrasi tentunya diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional guna memberantas korupsi di wilayah Pemerintahan Kabupaten batang.

Prestasi Kabupaten Batang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dalam upaya untuk memberantas korupsi di antaranya : *pertama*, Transparansi Anggaran dan Pembangunan. Selama menjabat sebagai Bupati, Yoyok menerapkan transparansi anggaran dan pembangunan pada Kabupaten Batang. Hal ini wajar mengingat bupati sebelumnya tersangkut masalah anggaran. Akibatnya, bupati tersebut menjalani hukuman pidana. Kepercayaan masyarakat Batang pada pemerintahnya pun turun. Mulai tahun 2012, Pemkab Batang bekerja sama dengan Ombudsman RI di bidang layanan publik. Kerja sama ini terlihat saat Pemkab menerapkan lelang jabatan. *Kedua*, Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2). Yoyok juga membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Kabupaten Batang pada 2013. Kantor ini bertugas melayani semua usulan dan pengaduan masyarakat yang belum digarap atau belum masuk agenda pembangunan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran pada 2013 menyatakan, Pemkab Batang merupakan daerah dengan urutan terendah dalam penyimpangan anggaran se-Jateng. *Ketiga*, pembentukan LPSE Batang. Dalam pengadaan barang dan jasa, Yoyok belajar kepada Pemkot Surabaya untuk mengadopsi sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Sistem yang berhasil dikembangkan oleh Tri Rismaharani ini terbukti dapat mencegah rekayasa dan korupsi. ‘Hasil belajar’ Yoyok kepada Risma segera terlihat. LPSE Batang meraih standar ISO 27001 dari Lembaga Sertifikasi Internasional ACS Registrars pada 2014 lalu. *Keempat*, mengadakan Festival Anggaran. Terkait transparansi, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Pemkab Batang. Ini tidak lepas dari inovasi kebijakan melalui kegiatan Festival Anggaran di 2014 yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Melalui kegiatan itu, masyarakat bisa membaca dan mengkritisi program pembangunan beserta anggaran yang digunakan Pemkab Batang secara terbuka. *Kelima*, Kabupaten Batang Raih Peringkat 10 Nasional. Pemerintah Kabupaten Batang mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berupa penghargaan Kinerja Pelayanan Publik. Pemkab Batang masuk pada peringkat 10 Nasional dari 114 Pemkab dan kota se-Indonesia yang dievaluasi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan “Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Memberantas Korupsi di Kabupaten Batang, Selama Periode Kepemimpinan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo Tahun 2012 – 2017”.

Tinjauan Teoritis

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi berasal dari bahasa asing “reformation” (Inggris) atau reformatie (Belanda). Kata dasar “reformation” berasal dari kata reform yang berarti membentuk kembali. Reform berasal dari kata form yang berarti bentuk atau membentuk (Frances. 2008 : 21).

Secara teoritis, reformasi (Poltak dkk. 2011 : 25) adalah perubahan di mana perubahannya terbatas sedangkan keluasan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. Sebagai perubahan yang terbatas tetapi seluruh masyarakat terlibat, reformasi juga mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyarakat, termasuk cita-cita, lembaga-lembaga dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita. Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Harapan demikian dihubungkan dengan

menguatnya kontrol masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ramlan Surbakti (Santoso, 2008: 116) mengatakan, kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu, bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai daripada melayani masyarakat. Akhirnya, wajar saja jika kemudian birokrasi dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Fenomena itu terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai masyarakat dan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak sebagai pangreh praja daripada pamong praja.

Reformasi birokrasi pemerintahan saat ini memang belum sepenuhnya terlihat. Birokrasi pemerintahan masih kental dengan nuansa klasik, yaitu kekuasaan tunggal ada di tangan pemerintah. Selain itu, rancangan besar yang lengkap dan tuntas mengenai penyelenggaraan birokrasi pemerintah belum terlihat. Struktur organisasi pemerintahan bahkan tergolong gemuk, sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung boros.

Menurut Miftah Thoha (2008), reformasi adalah suatu proses yang tidak bisa diabaikan. Reformasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan pemerintahan yang baik pada suatu masa, dapat menjadi tidak sesuai lagi karena perkembangan jaman. Reformasi birokrasi yang mendasar semestinya memberikan perspektif rancangan besar yang akan dilakukan. Perbaikan di satu bidang harus menunjukkan kaitannya dengan bidang yang lain. Apalagi dengan menganut sistem pemerintahan yang demokratis, maka setiap kebijakan publik harus mengakomodasi setiap kebutuhan rakyat. Miftah menegaskan, pemimpin daerah seharusnya mengenal warganya secara baik, sehingga pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan penguasa, tetapi lebih kepada kepentingan publik. Antrean panjang dalam memperoleh bantuan, padahal sudah ditimpa bencana, masih dipersulit dengan birokrasi yang panjang, adalah contoh bahwa pelayanan publik belum berorientasi pada kepentingan publik. Kelemahan lain birokrasi di Indonesia antara lain karena banyak kegiatan yang tidak perlu dilakukan, tetapi tetap dipaksakan untuk dijalankan oleh pemerintah.

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward dan punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kemudian, beberapa prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat dikemukakan sebagai berikut.

a) *Outcomes oriented*

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.

b) Terukur

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.

c) Efisien

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.

d) Efektif

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.

e) Realistik

Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistis dan dapat dicapai secara optimal.

f) Konsisten

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.

g) Sinergi

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.

h) Inovatif

Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan *best practices* untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

i) Kepatuhan

Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j) Dimonitor

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

2. *Good Governance*

Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

OCED dan World Bank mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

a. *Konsep Good Governance*

Menurut Horby dalam Jimung (2005:103) istilah *good governance* memfokuskan diri pada tindakan, fakta atau tingkah laku *governing*, yakni mengarahkan atau mengendalikan atau

mempengaruhi masalah publik dalam suatu Negara. Karena itu, *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku kehidupan keseharian.

Sementara UNDP (*United National Development Programme*) dalam Jimung (2005:103) mendefinisikan *good governance* adalah “*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation affair at all level*”. Dalam arti *good governance* mempunyai tiga kaki yakni: ekonomi, politik, dan administrasi. *Economic authority* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty, and quality of life*. Sementara *political authority* meliputi proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Sedangkan *administrative authority* menjelajah implementasi *policy*. Maka institusi *governance* meliputi tiga domain, yakni: *state* (Negara), sektor swasta atau *privat sector* and *society*. Ketiganya saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Di pihak lain, dia berperan sebagai regulator dan fasilitator yang memungkinkan masyarakat secara mandiri berperan aktif sebagai pelaku ekonomi. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan *society* (masyarakat) berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, dan termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi di lingkup tanah substansial tersebut.

b. Prinsip Good Governance

Agus Dwiyanto (2008:102) menjelaskan beberapa prinsip yang harus diterapkan demi terwujudnya *good governance*, dalam hal ini penulis menggunakan tiga prinsip utama *good governance*, yaitu:

1. Transparansi

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Karena itu, setidaknya ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator kedua dari transparansi menunjuk

pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Dan yang ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Partisipasi

Dalam hal pelayanan publik, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* ini juga sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (*customer*) melainkan sebagai warga Negara yang memiliki Negara dan sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya (*owner*). Pergeseran paradigma ini mengisyaratkan bahwa masyarakat sejak awal harus dilibatkan dalam merumuskan berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, misalnya mengenai jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, cara terbaik untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mekanisme untuk mengawasi proses pelayanan, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme untuk mengevaluasi pelayanan.

3. Akuntabilitas

Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran diantara pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

3. **Teori Pemberantasan Korupsi**

Wacana yang mempengaruhi cara berpikir dalam upaya mengurangi korupsi di Indonesia kebanyakan masih terfokus pada pemberantasan korupsi. Memang harus diakui bahwa dalam situasi begitu akutnya persoalan korupsi, pemberantasan melalui pendekatan hukum memang harus senantiasa dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Tetapi perlu diingat bahwa upaya untuk menangkal korupsi yang akan bertahan dalam waktu yang lama adalah pencegahan secara sistematis. Untuk menangkal korupsi secara umum ada tiga pendekatan yang harus dilakukan, yaitu : 1) cara sistemik-struktural yang biasanya dilakukan dengan peningkatan pengawasan dan menyempurnakan sistem manajemen publik. 2) cara abolisionistik yang dilakukan dengan penegakan hukuman dan memberi sanksi kepada koruptor seberat-beratnya, dan 3) cara moralistik yang dilakukan dengan memperhatikan faktor moral manusia. (Purwanto, dkk : 2005)

Korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. *Pertama* karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagaimana besar orang.

Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.

Dalam pengertian sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu korupsi dipahami dalam konteks perilaku pejabat-pejabat sektor publik - politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri, atau bersama orang-orang yang dekat dengan mereka (Pope, 2003 : 2).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, karena untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi dalam pemerintahan Kabupaten Batang. Menurut Creswell (2010 : 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selanjutnya, Noor (2009 : 34), penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010 : 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang

mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Selama tiga dekade, studi kasus telah didefinisikan oleh lebih dari 25 ahli. Creswell (2010 : 20) mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Hasil dan Pembahasan

Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang, periode kepemimpinan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo tahun 2012 – 2017 di dapati hasil dan pembahasan sebagai berikut :

a.) Proses Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang

Proses reformasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka memberantas korupsi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, yang juga merupakan perubahan besar dalam pemerintah Kabupaten Batang. Kalau dilihat selama lima tahun kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, dari tahun 2012 – 2017 sudah mengalami banyak perubahan ke arah yang jauh lebih baik, prosedur kerja, struktur, tingkah laku, dan kebiasaan yang telah lama di birokrasi sudah jauh lebih baik. Selama masa kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo tidak ada data yang menunjukkan terjadinya kasus korupsi di Kabupaten Batang, yang menunjukkan bahwa visi Kabupaten Batang “*Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Profesional*” dapat dikatakan berhasil. Reformasi birokrasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

b.) Kebijakan Anti Korupsi yang Dilaksanakan

Selama lima tahun menjabat, Yoyok Riyo Sudibyo sudah menerima sejumlah penghargaan, terutama yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan transparansi anggaran. Salah satunya yaitu penghargaan Bung Hatta Award (ajang penganugerahan penghargaan bagi insan Indonesia yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap, dan berperan aktif memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi).

Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan di Kabupaten Batang, di antaranya yaitu pelaksanaan festival anggaran sebagai wujud pelaksanaan transparansi, akuntabilitas dan juga untuk membangun partisipasi masyarakat. Kemudian pembentukan lembaga. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan revolusi mental di Kabupaten Batang, Yoyok menekankan soal revolusi budaya antikorupsi yang digagasnya di Kabupaten Batang. Salah satunya terkait pengeluaran surat edaran mengenai wajib salat 5 waktu, serta penerapan teken pakta integritas dan LPSE di Kabupaten Batang.

c.) *Faktor Kunci Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya memberantas korupsi di Kabupaten Batang dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya yaitu faktor pemimpin, yang menjadi pionir utama, pengambil keputusan dalam hal ini Bupati Kabupaten Batang Yoyok Riyo Sudibyo. *Kedua* yaitu mental disiplin, komitmen dan konsisten terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian yang *ketiga* yaitu kerja sama dengan lembaga atau pihak terkait misalnya kerja sama dengan Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia, keduanya diajak untuk membantu membangun tata kelola lelang barang dan jasa agar lebih transparan dan minim praktik korupsi. *Keempat* yaitu mengenai partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap proses pelaksanaan reformasi birokrasi.

d.) *Hambatan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*

Hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten penulis rangkum dalam tiga faktor, yaitu :

1.) Budaya Lama Birokrasi

Budaya tersebut menimpa di banyak pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Batang dimana pegawai yang sudah nyaman dengan budaya lama yang malas, lambat dan tidak produktif. Namun, hal demikian di perbaiki oleh Yoyok selaku pimpinan daerah dengan ketegasan dan disiplin dalam memimpin. Hasilnya memang belum bisa dirasakan secara instan, karena hal tersebut membutuhkan proses yang tidak sebentar.

2.) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Bupati Batang sendiri, Yoyok Riyo Sudibyo, mengakui bahwa SDM yang dimiliki Kabupaten Batang masih lemah dan belum profesionalitas. Perlu ditingkatkan lagi dan dilatih secara terus menerus.

Permasalahan selanjutnya adalah dalam pelatihan, banyak para pegawai di Kabupaten Batang yang tidak bisa menerapkan ilmu dalam pelatihan di daerahnya, hal tersebut disebabkan karena kesenjangan antara pendidik dengan peserta, materi pelatihan, dan juga kompleksitas masalah di birokrasi itu sendiri.

3.) Permasalahan Anggaran

Faktor Penghambat yang terakhir yaitu mengenai minimnya anggaran yang tersedia di pemerintah Kabupaten Batang. Dari awal Yoyok memimpin, Kabupaten Batang termasuk daerah termiskin di Jawa Tengah. Hal itu tentu menjadi penghambat dalam banyak hal, banyak kegiatan atau program yang tidak berjalan dengan semestinya karena terbatasnya anggaran yang ada.

Kesimpulan

Adapun simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah :

- 1) Proses reformasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka memberantas korupsi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, yang juga merupakan perubahan besar dalam pemerintah Kabupaten Batang. Kalau dilihat selama lima tahun kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, dari tahun 2012 – 2017 sudah mengalami banyak perubahan ke arah yang jauh lebih baik, prosedur kerja, struktur, tingkah laku, dan kebiasaan yang telah lama di birokrasi sudah jauh lebih baik. Selama masa kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo tidak ada data yang menunjukkan terjadinya kasus korupsi di Kabupaten Batang, yang menunjukkan bahwa visi Kabupaten Batang “*Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Profesional*” dapat dikatakan berhasil. Reformasi birokrasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.
- 2) Kebijakan anti korupsi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang yaitu sesuai dengan tiga prinsip utama *good governance*, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya untuk memberantas korupsi, di antaranya adalah: pelaksanaan festival anggaran, pembentukan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2), pelaksanaan revolusi mental, penerapan pakta integritas dengan pihak terkait dan pelaksanaan LPSE di Kabupaten Batang.
- 3) Faktor kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang yakni dipengaruhi oleh, pertama pemimpin, yaitu Bupati sebagai pionir dari semua kebijakan. Kedua sikap disiplin, komitmen dan konsisten dari semua unsur penyelenggara pemerintahan. Ketiga yaitu Kerja sama dengan beberapa pihak. Keempat yaitu partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

- 4) Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penghambatnya yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Kabupaten Batang serta budaya birokrasi lama yang masih ada di birokrasi Kabupaten Batang.. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah Kabupaten Batang untuk melakukan kebijakan yang dicanangkan.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan dua saran, yaitu saran akademik dan saran praktik. Saran akademik yakni sebagai pengembangan kajian dalam ilmu pemerintahan dan politik, khususnya dalam konteks pemahaman reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi di pemerintah daerah. Saran akademik yang dapat diberikan oleh peneliti ialah:

- 1) Perlu dilakukan kajian dan penelitian yang mendalam terkait dengan reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah lain guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di jurusan Ilmu Pemerintahan.
- 2) Perlu dilakukan kajian dan penelitian yang mendalam terkait dengan reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang setelah kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo sebagai bentuk penelitian lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan ini.
- 3) Terkait dengan fenomena munculnya kepala daerah dengan gaya dan kebijakan yang baru di Indonesia, maka perlu dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan terbuka terhadap segala aspek yang mempengaruhi kepemimpinan pemerintahan di daerah.
- 4) Oleh karena pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, maka perlu dilakukan penelitian kuantitatif guna mengukur efektivitas kepemimpinan pemerintahan di daerah (Khususnya Kabupaten Batang) melalui tingkat kepuasan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk melengkapi penelitian kualitatif yang telah dilakukan oleh peneliti.

Berkaitan dengan praktik reformasi birokrasi di daerah, maka rekomendasi-rekomendasi praktik berikut ini penting untuk meningkatkan kinerja kepala daerah dalam memimpin pemerintahan daerah agar lebih efektif lagi. Saran-saran praktik tersebut di antaranya adalah:

- 1) Diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya kualitas birokrasi di pemerintahan daerah agar mampu menyokong terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional yang berkelanjutan.

- 2) Secara umum, sistem pemerintahan Kabupaten Batang yang sudah dibentuk oleh Bupati Yoyok Riyo Sudibyo sudah baik dan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lagi serta dijaga oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di Kabupaten Batang.
- 3) Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang perlu diterapkan di daerah-daerah lain, karena berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan terbukti berhasil dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, birokrasi yang efektif dan bersih serta jauh dari tindak korupsi.
- 4) Diperlukan partisipasi masyarakat yang besar untuk juga mendukung segala program inovasi kebijakan yang telah dilakukan. Karena tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun membangun manusia juga merupakan hal penting untuk menjadikan daerah lebih baik.

Daftar Pustaka

- Albrow, Martin. *Birokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2007.
- Arif, Saiful. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Malang : Program Penguatan simpul demokrasi Kabupaten Malang PLACID's (Public Policy Analysis and Community Development Studies) Averroes, 2006.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- *.Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ginting, Rosalina & Titik Haryati. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011.
- Jimung, Martin. 2005. *Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Pustaka Nusantara : Yogyakarta
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. DKI Jakarta : Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI, 2001.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Lalolo, Loina Krina P. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.

- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta : Transparency International Indonesia, 2003.
- Pramusinto, Agus dan Wahyudi Kumorotomo. *Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang profesional*. Yogyakarta : Gavamedia, 2009.
- Purwanto, Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo. *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*. Yogyakarta : Gava Media, 2005.
- Siagian, Sondang P. *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi, dan Terapinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wijayanto & Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2009.